

TIDAK USAH MUNAFIK!¹

Oleh Nurcholish Madjid

Cak Nur, begitu ia biasa dipanggil, memang bisa diibaratkan sebagai sebuah kitab yang unik; di dalamnya terkandung pemikiran-pemikiran Islam klasik dan sekaligus kontemporer. Kemampuan interpretasinya atas ajaran-ajaran Islam dan usaha mewujudkannya dalam kehidupan masyarakat, membawanya pada gagasan tentang keislaman dan keindonesiaan. Pemikiran bahwa kita harus mampu menampilkan Islam dengan wajah kultural, lahir dari intelektual yang satu ini. Berikut ini petikan perbincangan Nurcholish Madjid dengan Mohamad Sobary wartawan tamu dari *MATRA*.

Begini Cak Nur, saya ingin penjelasan lebih lanjut tentang Islam yang harus tampil dengan tawaran kultural, produktif, dan konstruktif yang membawa kebaikan bagi semua itu.

Ada beberapa kata kunci sekitar idiom itu. *Pertama*, yang dimaksud dengan tawaran kultural itu tidak semata-mata nenunjuk hal-hal sempit dan partisan. Misalnya politik dan ideologi semata. Tapi kultural dalam suatu format yang meliputi segala-galanya. Itu syarat utamanya.

Yang *kedua*, itu berarti harus responsif terhadap tantangan zaman. Saya kira itu tema yang sering kita kemukakan, yaitu bahwa sebetulnya tidak ada akhir perjalanan, tapi terus-menerus.

¹ Majalah *MATRA*, “Tidak Usah Munafik!”, No. 77 Desember 1992, Pewawancara Mohamad Sobary.

Dan dalam wujud nyatanya ialah bagaimana kita menampilkan Islam yang responsif terhadap tantangan zaman. Sebab kalau kita melakukan *flashback*, produk-produk yang paling kreatif dari Islam pun akhirnya merupakan responsi dari tantangan zaman.

Lalu yang *ketiga*, harus merupakan hasil dialog dengan tuntutan-tuntutan ruang dan waktu. Misalnya untuk Indonesia, ya harus merupakan dialog dengan tuntutan di Indonesia. Karena itu, kita katakan adanya semacam kesejajaran, jika tidak kesatuan, antara keislaman dan keindonesiaan. *Islamic values* dengan *Indonesian values* itu sebetulnya tidak bisa dipisahkan.

Ini bukan berarti mengklaim secara eksklusif Indonesia, tetapi semata-mata berdasarkan kenyataan bahwa bangsa Indonesia sebagian besar mengaku Muslim. Itu berarti bahwa ada potensi untuk menemukan basis kultural yang diilhami Islam. Dan ini sebetulnya sudah menjadi kenyataan nasional kita. Misalnya, nomanklatur perpolitikan itu banyak dari Islam: musyawarah, mufakat, rakyat, dewan, dan sebagainya.

Juga hukum, tertib, aman, masalah, dan macam-macam. Jadi secara tidak terasa, sudah terjadi akulturasi Islam dalam konteks Indonesia. Atau sebaliknya, sudah terjadi semacam pengndonesiaan terhadap nilai-nilai Islam. *Lho*, Gus Dur punya kata-kata kunci untuk itu, yaitu mempribumisasikan Islam, atau Pak Munawir: mengaktualkan Islam. Itu yang *ketiga*. Yang *keempat*, eksklusivisme itu harus diakhiri, diganti dengan inklusivisme, serba-meliputi siapa saja.

Caranya?

Seperti yang sering saya ajukan, di intern Islam harus terjadi semacam relativisme internal. Bahwa umat Islam itu tidak boleh memandang satu sama lain dalam pola-pola yang absolutistik. Malahan bisa kita ekstensi ke golongan-golongan yang lain, ke agama-agama yang lain, yaitu adanya suatu ajaran dalam agama

Islam, bahwa agama-agama lain itu berhak untuk hidup, malah harus dilindungi.

Tidak berarti pengakuan bahwa agama-agama lain itu benar, seperti yang sering ditonjolkan orang bahwa semua agama benar. Tetapi yang dimaksud adalah pengakuan akan hak dari setiap agama untuk eksis di dalam suatu hubungan sosial yang toleran, saling menghargai, saling membantu, menghormati, dan sebagainya.

Selain gagasan itu merupakan bagian dari prinsip toleransi, ada juga dalam pikiran Anda agar kita mengakhiri corak-corak pengalaman sejarah kita yang lalu? Atau mungkin karena Indonesia harus menyongsong era baru, yang lain sama sekali dari Indonesia masa lalu?

Betul. Jadi di sini ada sedikit kesalahpahaman, dikira kita menyesali apa yang sudah terjadi. Sebenarnya kita tidak punya hak untuk menyesali, misalnya saja, perjuangan partai-partai Islam sekitar tahun 1945 sampai tahun 1950-an untuk membuat negara Islam. Kita tidak menyesali. Artinya, kita menyadari bahwa menurut proses-proses kultural historis pada waktu itu, barangkali mereka memang harus berbuat seperti itu. Meskipun tidak usah percaya kepada semacam determinisme sejarah.

Tetapi jelas hal-hal itu ditentukan atau digiring oleh faktor-faktor obyektif. Maka dari itu kita tidak berhak menyesali. Tapi kita berhak menilai bahwa itu tidak usah diteruskan. Keadaan sudah berubah. *Nah*, orang-orang lama, seperti orang Masyumi dan sebagainya, mengira kita itu menyesali sejarah. Tidak. Itu kita harus lihat sebagai bagian dari sejarah. Tetapi kalau pikiran untuk bertahan dengan pola-pola seperti itu, *nah* kita menyesali. Dalam arti kita tidak setuju.

Dan tidak responsif terhadap tuntutan zarnan?

Ya. Karena zaman juga berubah. Di samping itu, kita juga mempertanyakan substansi dari keabsahan ide-ide dulu itu.

Lalu bagaimana agar kaum Muslim mampu mengembangkan paham kemajemukan itu?

Sebetulnya begini. Ketika orang mengatakan di Indonesia terjadi toleransi agama berkat Pancasila, itu mungkin betul. Tetapi mengapa Pancasila bisa melahirkan suatu sikap toleransi positif terhadap agama-agama, itu sebetulnya karena mayoritas bangsa Indonesia Islam. Sebab kalau dibalik, misalnya Islam itu minoritas di sini, itu kita bisa melihat apa yang terjadi di Filipina, Thailand dan sebagainya. Yaitu tidak ada toleransi. Jadi, Islam dan toleransi itu sudah merupakan suatu kesatuan organik.

Secara retorika politik, boleh saja orang mengatakan begitu, kita ada toleransi agama berkat Pancasila. Tapi kalau kita pergi ke Timur Tengah, ke Mesir, Syiria, Irak, mereka jauh lebih terlatih untuk hidup berdampingan dengan agama-agama lain, yang non-Islam. Jauh lebih terlatih. Karena itu memang merupakan *policy* dari para khalifah dahulu. Oleh karena itu, sampai sekarang di Mesir masih banyak orang Kristen, di Syiria itu — yang juga pusat Islam — sampai sekarang Islamnya hanya 80 persen, artinya yang 20 persen itu masih bukan Muslim, dan itu tidak pernah menjadi halangan.

Sebetulnya ada hal yang semu: Apakah betul kita lebih toleran dibanding orang Arab. Kalau saya bilang, orang Arab lebih toleran terhadap agama-agama lain. Cuma sekarang orang Arab itu terganggu akibat dari kompleksnya menghadapi Barat. Terutama disebabkan oleh kenyataan historis yang sangat pahit, yaitu dipaksakannya Israel.

Karena itu, kalau kita sekarang bicara pluralisme Islam, maka sesungguhnya bukan hal baru. Banyak kutipan yang bisa kita buat dari para ahli, misalnya mengenai Spanyol Islam. Spanyol Islam itu sebetulnya Spanyol tiga agama. Yang berkuasa Islam, yang mengambil inisiatif Islam, tetapi yang *share* dan yang *support* pola-pola budaya Spanyol Islam, itu adalah orang Kristen, orang Yahudi, dengan hak yang sama dan pergaulan yang bebas.

Jadi *Spain of three religions* itu adalah Spanyol dengan tiga agarna: Islam, Yahudi dan Kristen. Barulah setelah terjadi *reconquesta*, orang Islam dan orang Yahudi dibersihkan, sehingga akhirnya menjadi Katolik saja.

Dan Spanyol yang *multi-religion* seperti itu dipuji oleh orang seperti Ibn Taimiyah. Belum lagi kalau kita kembali kepada hal-hal yang *rada* normatif seperti apa yang disebutkan dalam al-Qur'an mengenai masyarakat manusia. Bahwa masyarakat manusia itu memang plural.

Apakah gagasan-gagasan Anda tadi itu, sedikit-banyaknya terkait dengan satu konsep bahwa Islam itu menyelamatkan, damai, dan lain-lain?

Ya, saya kira memang persis itu. Apalagi kata-kata sekitar itu sudah menjadi bahasa Indonesia, terutama selamat dan salam. Kalau bahasa Inggrisnya itu *safe and sound*, walaupun dalam bahasa Indonesia itu salam artinya menjadi *greeting*.

Tapi sebetulnya salam itu *kan* damai, mengucapkan salam artinya menyatakan damai. Dan sudah merupakan pembahasan yang baku, yang standar di kalangan para ahli bahwa memang Islam itu ada kaitannya dengan cita-cita menciptakan alam kedamaian dan menciptakan keselamatan, *salvation*.

Sekarang mengenai aktualisasi nilai-nilai universal Islam dalam masyarakat kita. Apakah ada semacam hambatan ideologis yang dijumpai dalam melaksanakan gagasan itu? Misalnya, Islam kita punya klaim tentang universalitas, tetapi agama lain juga punya klaim tentang universalitas. Bagaimana ini?

Memang semua agama mengklaim universalitas, kecuali barangkali orang Yahudi, yang memang tidak mau orang beragama Yahudi. Jadi nasionalis sekali. Agama Kristen, Budha, dan yang lain itu universalistik dalam pendekatannya mengenai kosmologi,

mengenai manusia, dan sebagainya. Maka mereka pun ya berhak untuk mengaku sebagai universal.

Lalu bagaimana penyelesaiannya? Begini. Seperti al-Qur'an sendiri bilang, sebetulnya kita itu diperintahkan untuk menemukan suatu titik-kesamaan. Di dalam bahasa Arab disebut *kalimat-un sawâ'*, itu merupakan perintah kepada Nabi supaya Nabi mencari titik-persamaan dengan golongan-golongan penganut Kitab Suci terdahulu.

Berarti dalam waktu sekarang ini kita bisa ketemu pada dataran ide yang mengalami cukup generalisasi. Sehingga tidak lagi terkait dengan konteks-konteks komunalnya.

Jadi tidak lagi harus dikenali: Ini adalah ide Islam, Kristen. Tapi ini adalah ide universal dan itu yang harus kita dukung. Contohnya seperti saya sebut tadi, orang Kristen pun senang Indonesia. Juga menganut, menghargai, dan ingin menghargai nilai musyawarah. Padahal musyawarah itu, dilihat dari segi bahasanya saja, Arab. Dan itu berarti Islam. Begitu juga tertib hukum, aman, dan segala macam itu.

Nah, karena nilai-nilai ini, di luar soal bahasa itu universal, maka bisa diterima oleh semuanya. Yang agak eksklusif *kan* bahasanya, tapi karena bahasanya sendiri sudah menjadi bahasa Indonesia, akhirnya tidak terasa lagi. Maka begitu juga mengaktualkan nilai-nilai Islam di masyarakat Indonesia, itu begitu. Jadi tidak perlu lagi bungkus-bungkus formal yang sangat merepotkan karena eksklusivismenya itu.

Kalau begitu apa kemudian dipandang perlu dialog antaragama di mana kita mencoba mencari titik-temu. Kalau ini perlu, itu pada dataran yang mana?

Jadi pada tataran praksis amal. Kita tidak usah intervensi dalam soal iman agama lain. Itu tidak boleh. Kita sudah diajari dalam al-Qur'an sendiri, "*la-kum dîn-ukum wa liy-a al-dîn*". Tapi kita bisa bersatu dalam program-program yang lebih amaliah, yang lebih

praksis, sejak dari yang nilainya tinggi seperti negara. Negara itu bisa menjadi proyek bersama.

Ini lebih menyangkut atau diharapkan dari kalangan elit saja ya?

Ya, ya. Dan segi sosiologis, memang tidak bisa dihindari. Bahwa apa yang disebut *trend maker*, kemudian juga disebut *opinion maker*, itu *kan* memang orang yang sanggup mengutarakan pemikirannya.

Tetapi kita juga berharap ini mengundang partisipasi dari bawah. Meminjam istilah para ekonom, terjadi semacam *trickling down*. Persoalannya ialah apakah *trickling down* itu kita biarkan terjadi secara *accidental*, secara kebetulan saja, ataukah seharusnya kita dorong secara sengaja, dengan *deliberation*. Nah, menurut saya itu harus ada kesengajaan. Tidak boleh dibiarkan terjadi menurut hukum perkembangan masyarakat saja.

Gagasan tentang perlunya Islam tampil dengan tawaran kultural dan Muslim harus mampu mengembangkan paham pluralisme itu, apa sudah tercapai? Dan sejauh mana ia sudah bergulir di masyarakat kita?

Tentu ada segi pesimis dan segi optimisnya. Pesimisnya kita masih melihat adanya orang-orang yang tidak bisa memahami masalah itu. Segi optimisnya, jelas tumbuh orang-orang yang bisa memahami masalah itu. Dan itu tampaknya ada kaitannya dengan masalah pendidikan.

Orang Masyumi dulu lancar saja bergaul dengan orang-orang Kristen, Sosialis, Katolik dan sebagainya, sehingga pergaulan politiknya itu tidak hanya dengan NU, PSII, Perti. Tetapi dengan PSI (Sosialis), Parkindo dan Partai Katolik. Sampai membentuk Liga Demokrasi pun sesama mereka. Meskipun ada beberapa orang unsur dari NU, tapi secara institusional itu dengan mereka-mereka ini.

Jadi kalau kita lihat eksperimen Masyumi, meskipun umurnya pendek, itu menunjukkan suatu kemungkinan yang positif: bahwa pergaulan yang lebih produktif antara berbagai kelompok agama bisa diwujudkan. Asal didasarkan pada pengalaman dan cita-cita yang sama. Dalam hal Masyumi tahun 50-an, pengalaman yang sama itu ialah pendidikan Barat, dan cita-cita yang sama ialah demokrasi.

Lalu, pada mereka yang pesimistis?

Mungkin karena ada kecemburuan, atau semacam “fanatisme”. Makanya itu bisa merupakan ideologi kelompok. Misalnya ada suatu kelompok yang mengaku merekalah penganut paham Islam yang sebenarnya. Oleh karena ini, dengan mengutip firman Tuhan, bahwa mereka harus keras terhadap orang kafir, tidak suka orang kafir. Itu kan semacam ideologi.

Itu adalah pembenaran dari suatu keadaan yang sudah ada sebelumnya, yaitu perasaan tidak suka itu sebetulnya terkait dengan *setting* sosiologis. Seperti misalnya karena orang lain ini kebetulan dari dulu menikmati *privilege* dan mereka sedang “naik”. Oleh karena itu pergeseran ini menimbulkan retorika-retorika yang keras itu.

Sebenarnya kalau kita mau merealisasi ajaran-ajaran mulia dalam Kitab Suci dan Hadis, apa ada hambatan ideologis maupun sosiologis?

Di sini tidak ada. Jadi Republik Indonesia dengan perangkat lunak (dasar dan konstitusinya) dan kerasnya (wujud atau sosok geografis dari negara kita), itu tidak menjadi hambatan sama sekali. Malahan banyak orang berpendapat, di antara negara-negara di mana Islam itu mayoritas, konon Indonesia adalah yang paling baik dalam soal pelaksanaannya.

Ada kelompok-kelompok tertentu dalam usaha mereaktualisasi atau mengaktualisasi cara-cara hidup Nabi dengan mencari rujukannya pada cerita-cerita di zaman Nabi. Apa itu cocok untuk kondisi kini?

Itu yang dimaksudkan oleh Pak Munawir sisi lain dari pemahaman kontekstual itu. Jadi, hal-hal yang sekarang dianggap sebagai nilai keagamaan Islam, sebetulnya besar sekali kemungkinan itu semata-mata nilai kultural Arab saja. Misalnya pakaian. Itu jadi *absurd* kalau kita menganggap bahwa pakaian itu bagian faktor yang menentukan orang itu bahagia. Itu *kan* susah.

Artinya pakaian itu cuma simbol?

Ya, itu simbol. Dan akan sangat berbahaya kalau sudah sampai pada tingkat menganggap simbol itu mutlak. Itu artinya memutuskan simbol, bisa jadi menyembahnya. Maksudnya tidak lagi menyembah Tuhan yang tidak tertangkap itu, tapi menyembah simbol. Oleh karena ada suatu keyakinan, bahwa semata-mata dengan simbol itu orang akan memperoleh keselamatan.

Jadi kita tidak bisa menerapkan begitu saja apa yang ada pada zaman itu, terutama hal-hal yang jelas-jelas bersifat kultural. Pakaian itu kultural sekali. Ada ide yang universal mengenai pakaian, yaitu menutup aurat. Tapi bagaimana caranya menutup aurat, itu yang jadi persoalan. Dan itu adalah persoalan budaya.

Kita tidak harus meniru yang datang dari Arab. Dulu orang Indonesia sarungan dan sarung itu sempat menjadi semacam *trade mark* untuk santri. Padahal, kalau kita pergi ke Birma, itu *kan* pakaian orang Birma. India juga begitu. Jadi konteks kultural itu harus dipahami. Dan memerlukan kajian yang tidak mudah.

Lalu yang disebut aurat wanita itu bagian mana saja, dan kewajiban wanita Islam itu bagaimana?

Dulu, sebelum saya meneliti lebih lanjut, saya juga menduga — bahkan sempat menulis — bahwa aurat wanita itu sekujur badannya, kecuali muka dan telapak tangan. Tapi ternyata saya disalahkan oleh almarhum Syaifudin Zuhri. Dan setelah kita teliti, ternyata itu memang problem. Menurut Syaifudin Zuhri, aurat wanita itu memang sekujur tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan, kalau sembahyang. Di luar sembahyang, rambut itu bukan aurat. Dan mengenai telapak tangan itu masih berselisih. Apalagi wanita pekerja. Itu ternyata variasinya banyak sekali. Sekarang saja ada polemik antara Saudi dan Iran. Orang Iran mengatakan wajah itu bukan aurat, orang Saudi mengatakan bahwa ini masih polemis, khilafiyah.

Saya berpendapat bahwa ide mengenai perintah berpakaian tertentu itu adalah soal kepantasan. Dan kepantasan itu bisa bervariasi menurut satu tempat ke tempat yang lain. Mungkin orang Saudi, karena budayanya, ya kepantasannya itu mengharuskan mereka berpakaian seperti itu. Di Iran juga begitu. Tapi di Indonesia nggak perlu. Buktinya orang-orang di NU, ulama-ulama perempuannya berpakaianya ya seperti itu, berkebaya, kerudung yang tidak seperti jilbab. Itu sebetulnya akibat dari perubahan sosial yang terlalu cepat dan sebagainya. Maka, menurut saya, tidak harus pakai jilbab.

Jadi itu tidak ada kaitan misalnya dengan kebangkitan Islam yang lebih militan, begitu?

Ya, orang mengira itu kebangkitan. Tapi menurut saya itu bukan kebangkitan. Tapi pertumbuhan yang masih kritis, merupakan *critical growth*, untuk menuju pertumbuhan yang sebenarnya. Ini *kan* puber.

Apalagi memang dalam al-Qur'an isu jilbab dan kerudung itu kaitannya dengan dada. Bukan dengan rambut. Jilbab itu sebetulnya

bukan kerudung tapi baju mantel. Kurang lebih perintahnya adalah pakailah mantelmu itu untuk menutupi dadamu, begitu. Bukan untuk menutupi rambutmu.

Ini simbolisme. Tidak ada urusannya dengan nilai, tidak ada urusannya dengan masalah menjalankan syariat. Kalau menjalankan syariat mestinya orang lebih tahu bahwa menutup lutut jauh lebih penting daripada menutup rambut. Menutup dada jauh lebih penting daripada menutup rambut.

Tapi kalau mereka mau begitu ya sudahlah. Itu hak mereka. Itu bagian dari keagamaan mereka. Dan setiap orang berhak untuk memilih idiom agama mereka sendiri-sendiri. Tapi kita memilih tidak begitu, dan mereka harus toleran terhadap kita.

Kelompok-kelompok tertentu menampilkan Islam dengan lambang-lambang yang jelas, corak komunikasi yang jelas. Lepas dari setuju atau tidak, apakah itu ada semacam keharusan ideologis yang jadi rujukan?

Pertama harus kita sadari kelompok seperti itu tidak hanya di kalangan Islam, tapi juga di kalangan orang Kristen. Justru fundamentalisme itu munculnya di kalangan orang Kristen. Kalau di Amerika, orang seperti Southern Baptists, Amish, itu adalah golongan fundamentalis.

Jadi pada orang Kristen sebetulnya lebih parah lagi. Sebab *denomination* di Amerika itu ratusan dan masing-masing mengklaim sebagai yang paling benar. Bagaimana menafsirkan persoalan ini, salah satunya adalah bahwa itu gejala-gejala yang timbul dari suatu masyarakat yang berubah dengan cepat.

Jadi gejala orang bingung, kemudian mencari pegangan. *Nah*, pegangan yang diperlukan dalam situasi kritis itu biasanya makin sederhana semakin baik. Semakin pasti semakin baik. Jadi, kalau misalnya ada seorang guru mengatakan: “Ikut saya kamu akan selamat. Yang lain itu semuanya celaka,” itu sangat menarik.

Dan itu terjadi di mana-mana, dengan wujud yang kadang-kadang bertentangan. Taruhlah misalnya di Indonesia. Ada kelompok yang namanya Islam Jamaah. Ini juga cukup eksklusif tapi pembawaannya toleran sekali. Mereka membawakan dirinya itu bersahabat. Pakaiannya juga lebih rileks. Pakai celana, pakai jeans ke masjid juga nggak apa-apa.

Nah, sekarang Darul Arqam sebagai kelanjutannya. *Platform*-nya sama, dalam arti bahwa dua-duanya mengklaim sebagai kelompok yang paling benar, paling selamat. Tapi kalau Islam Jamaah, membiarkan orang memakai jeans, Darul Arqam harus pakai jubah, pakaian Arab, dan lain-lain.

Dua contoh ini *kan* bertentangan. Tapi intinya sama, yaitu *cultic system*. Sekarang ini banyak muncul seperti itu, karena masyarakat kita sedang mengalami pembangunan yang sangat cepat, dan efek perubahan yang cepat itu kita ketahui dalam *sociology of social change*.

Perubahan itu selalu menimbulkan kecurigaan pada orang-orang yang tidak bisa terbawa. Jadi menimbulkan apa yang disebut disorientasi, tidak tahu lagi apa pandangan hidup yang benar; dislokasi, orang tak tahu lagi tempatnya dalam skema sosial. Dislokasi bisa juga sangat fisik, seperti urbanisasi itu termasuk proses-proses dislokasi dengan efek yang sama. Dan juga deprivasi relatif, merasa ditinggalkan, merasa haknya dirampas. Orang mungkin tidak mengalami dislokasi secara keseluruhan, tapi hanya satu bidang saja.

Orang bisa saja sukses dalam bidang material seperti jadi pemborong yang besar dan sebagainya, tapi dari segi sosio-kultural dan sosio-politik tidak mengalami kebebasan. Itu semuanya menjadi bibit-bibit *disappointment* dan kekecewaan yang kalau disuarakan akan menghasilkan retorika-retorika keras. Kalau dikumpulkan satu sama lain akan menimbulkan suatu kelompok dan yang menyatukan itu menjadi kultus.

Corak penampilan yang serba ingin eksklusif itu menjadi gambaran dari apa? Puritanisme? Fundamentalisme?

Mungkin lebih tepat kalau puritanisme. Mau suci, mau bersih. Tapi karena penampilannya itu sangat asertif, sangat menegaskan bahwa kami ada di sini, kamilah yang benar dan sebagainya, memang patut juga disebut fundamentalisme.

Kalau melihat pemikiran Anda seperti itu, apakah kemudian masih bisa dibedakan antara seorang nasionalis dan seorang Muslim?

Dari satu arah, seorang Muslim itu bisa menjadi nasionalis. Tapi nasionalisme dalam Islam itu adalah suatu nasionalisme, suatu paham kebangsaan yang diletakkan dalam kerangka kemanusiaan yang universal. Jadi tidak boleh menjurus kepada chauvinisme. Ini memang suatu perdebatan klasik di kalangan para pendiri republik, tapi perlu kita tegaskan bahwa dalam rumusan Pancasila, Persatuan Indonesia disebut sebagai ganti kebangsaan atau nasionalisme. Berarti titik-berat nilainya pun nilai persatuan. Dan kalau nilai persatuan, itu sudah jelas sangat Islami.

Sekarang apakah masih ada ruang bagi nasionalisme seperti yang kita cari. Menurut saya masih ada. Tuhan itu menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar mereka bisa saling mengenal dan menghormati. Seorang Muslim seharusnya juga seorang nasionalis, meskipun tidak semua nasionalis itu harus Islam.

Dalam meniti jalur untuk menunjukkan cinta negara atau masyarakat di satu pihak, dan cita-cita mengaktualisasikan kembali ajaran al-Qur'an pada pihak lain, adakah saat-saat kita harus lebih mengutamakan satu dan agak mengabaikan yang lain, atau harus selalu bisa kita temukan paralelitas yang harmonis?

Kalau menurut saya, seharusnya tidak pernah terjadi persoalan alternatif, ini atau itu. Tapi sekaligus *all at once* begitu. Jadi ketika seseorang itu melaksanakan ajaran agamanya, maka pada

waktu yang sama ia juga mendukung nilai-nilai yang baik, yang menguntungkan bagi bangsanya.

Taruhlah misalnya begini. Misalnya, ada seorang pekerja yang produktif. Lalu, apakah harus dilihat sebagai suatu tindakan kenasionalan, karena *concern* kita mempunyai keprihatinan terhadap pergerakan produktivitas bangsa, atautkah sebetulnya itu merupakan nilai keagamaan, karena kita ingin melaksanakan ajaran agama bahwa manusia itu harus produktif, harus beramal?

Seharusnya tidak bisa dilihat seperti itu. Ketika dia menjadi produktif, maka dia sekaligus menjalankan ajaran agama dan menunjukkan komitmen kepada nilai kebangsaan. Contoh seperti itu banyak sekali. Jujur, tidak korupsi, taat hukum, dan sebagainya.

Apa Anda merasa was-was bila di sini tidak ada “warnawarna” lain, termasuk hadirnya Paramadina, menghadapi “warna” tertentu yang cenderung eksklusif?

Persis. Kita tak mau pengalaman Sarikat Islam (SI) terulang. SI itu dulu hebat sekali, maka orang banyak berharap. Ada suatu peningkatan harapan yang melambung tinggi sekali. Oleh karena itu, SI dalam mobilisasi massanya itu berhasil. Tapi, ketika harapan yang sangat emosional ini sudah mulai jenuh dan orang menuntut hal yang lebih tinggi, ternyata pemimpin SI tidak siap. SI kemudian pecah: merah dan putih. Yang ironis, merahnya terus berkembang, putihnya tidak. Jadi saya khawatir akan terulang dalam skala yang jauh lebih besar dan jauh lebih sulit. Karena itu, kalau kita tidak bisa berbuat sesuatu dan tidak bisa mengantisipasi perkembangan ini, jangan heran kalau nanti yang bakal anti Islam adalah orang-orang yang sekarang fanatik Islam. Karena fanatisme itu adalah suatu wujud dari harapan. Kalau harapan itu begitu tinggi dan tidak terwujud, karena tak bisa di-*follow up* oleh intelektual, orang kecewa.

Kami dengar Paramadina itu menanamkan sifat nonsektarianisme dan Ukhuwah Islamiyah pada saat yang bersamaan. Bagaimana penjelasannya?

Ya, non-sektarianisme itu persis ukhuwah Islamiyah. Itu suatu paham bahwa bukan aliran sendiri yang benar. Sektarianisme itu artinya suatu paham bahwa aliran sendiri yang paling benar. Itu yang tidak dikehendaki oleh agama.

Apa dalam Islam ada gagasan tentang corak kolaborasi antara umat dengan penguasa?

Sebetulnya tidak ada konsep yang jelas. Itu diserahkan sebagai bagian dari perkembangan kultural saja. Jadi tidak ada doktrin yang langsung mengenai hal itu. Hanya ada dikesankan pemerintah itu harus menjalankan amar makruf nahi munkar. Yaitu memelihara moralitas masyarakat dan sebagainya.

Di Islam ada ide tentang kekuasaan?

Ya tentu ada. Meskipun tidak berarti bahwa Islam itu mengajarkan untuk berkuasa. Tapi mengajarkan supaya siapa saja yang melakukan kekuasaan itu menjalankan keadilan.

Di Indonesia partai Islam kehilangan isu pokok karena sejumlah klaim diambil oleh Golkar. Misalnya, Islam agamaku, Golkar pilihanku. Atau, Golkar menang Islam berkembang. Bagaimana menurut Anda?

Ya, jelas partai PPP misinya *pre emted*, direbut dan diduduki. Sebetulnya, kalau orang PPP itu berbesar jiwa, harus bisa melihat bahwa cita-citanya telah diambil partai lain. Dan mestinya mereka mendukung.

Atau....

Kalau mau, membubarkan diri. Atau kalau masih melihat ada hal-hal yang belum tergarap dan mereka merasa bisa, tunjukkan kemampuan itu. Jangan mengulang-ulang hal-hal yang sekarang sudah menjadi milik umum.

Jadi tidak perlu ada rasa jengkel?

Sama sekali tidak. Islam itu memang harus dibuat sebagai sesuatu yang gratis untuk semuanya.

Gratis bagaimana?

Ya artinya *available to all* justru karena berharga. Sama seperti udara yang masuk ke tubuh kita. Tanpa udara kita bisa mati. Tapi Tuhan menjadikannya *available to all*, gratis untuk semuanya. Air masih harus bayar, dan kita masih bisa sehari tidak minum. Tapi tanpa udara bagaimana? Jadi sesuatu yang betul-betul *precious*, betul-betul berharga, betul-betul dibutuhkan, itu harus dibikin gratis untuk semuanya.

Dengan kata lain Anda melihat proses klaim-klaim yang dilakukan partai non-Islam terhadap Islam, sebenarnya cara positif sekali? Tapi bagaimana kalau di dalam sikap itu sebenarnya terselip tujuan-tujuan yang sangat politis?

Itu cara positif, tapi kalau ada sikap oportunisme di dalamnya, kita tidak usah peduli. Karena efek sosialnya tidak bisa mereka kontrol. Itu sama saja dengan ketika orang Masyumi mengkritik Bung Karno naik haji segala, dan itu sebagai tindakan politik. Kalau memang dia naik haji tidak ikhlas, dengan pamrih, itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi kenyataan bahwa ia naik haji itu punya efek sosial yang tidak dikuasai oleh Bung Karno sendiri.

Bagaimana Anda merenungkan kembali statemen Anda tahun 70-an; Islam yes, Partai Islam no, setelah rentang waktu puluhan tahun ini?

Saya kira masih relevan, masih bisa diteruskan.

Atau itu makin mengeras, seperti gagasan Islam dan keindonesiaan itu?

Ya, saya kira begitu.

Anda pernah khawatir tentang etnisitas dan agama dijadikan senjata untuk segala macam, yang bisa merugikan banyak pihak?

Saya cenderung begitu. Oleh karena itu saya termasuk yang menghargai ABRI, antara lain Pak Try. Ketika terjadi keonaran di Lampung, dan mereka mengklaim itu sebagai Islam, tapi Pak Try melihatnya sebagai GPK saja. Seperti Aceh juga. Jadi jangan seperti dulu, malah aspek Islamnya dibesar-besarkan.

Sering secara sosiologis Islam itu hanya dipakai sebagai pembenar untuk aspek-aspek yang menjadi *concern* mereka di suatu tempat. Setempat. Maka kalau kita melihat hanya Islam dan lupa pada persoalan yang sebenarnya, ya kita lupa.

Lalu bagaimana agar hal-hal itu bisa dicegah?

Itu menyangkut reformasi politik yang cukup penting. Saya percaya dengan konstitusi. Oleh karena itu semuanya harus konstitusional. Termasuk reformasi itu harus konstitusional, ada otonomisasi daerah yang lebih besar, ada pemerataan dan sebagainya.

Anda juga pernah menyebutkan bahwa semua agama yang intinya berserah kepada Tuhan itu Islam. Maksudnya?

Begini. Menurut al-Qur'an semua agama yang intinya mengajarkan pasrah kepada Tuhan, disebut Islam. Dan Islam itu artinya berserah diri pada Tuhan. Oleh karena itu orang yang beragama tanpa sikap pasrah kepada Tuhan itu ditolak, meskipun dia secara KTP mengaku sebagai seorang Islam. Itu maksud saya. Jadi Islam dalam arti yang lebih generik, bukan dalam arti yang sosiologis sebagai nama agama.

Sebagai pembaru, Anda sering disalahpahami. Bagaimana Anda melihat atau menilai reaksi seperti itu?

Tentu kita semuanya sudah antisipasi. Saya dan teman-teman sudah antisipasi. Bahwa pasti akan ada reaksi-reaksi, baik reaksi itu memang tidak setuju atau memang salah paham. Umumnya karena salah paham. Memang sebagai manusia tentunya kesalahpahaman seperti itu sangat membikin kita sesak nafas.

Dalam al-Qur'an saja Nabi Muhammad diingatkan oleh Tuhan: kamu jangan menjadi sempit dadamu, sesak nafasmu hanya karena perlawanan mereka. Itu artinya Nabi saja mengalami hal itu, apalagi kita. Dan karena jangkauan kita lebih jauh ke depan, kita yakin bahwa kita, *on the right track*. Apalagi kita melengkapi diri dengan pengetahuan dan bahan-bahan. Dan karena bahan itu banyak sekali, maka sulit untuk dikatakan dalam waktu yang singkat.

Pada saat-saat menjelang akhir hayatnya, Soedjatmoko bicara tentang perlunya agama atau para agamawan lebih berperan aktif lagi dalam proses pembangunan. Bagaimana Anda sendiri melihat peran agama di masa depan, khususnya dalam politik?

Kembali kepada *common platform* tadi. Juga kembali lagi kepada makna Islam yang generik tadi itu. Jadi agama yang bisa berfungsi itu hanya agama Islam, dalam arti Islam pasrah kepada Tuhan itu. Bukan Islam sebagai nama agama. Dan kita harus menarik

semuanya kepada ini: sikap pasrah kepada Tuhan ini, secara tulus, secara hanif itu.

Ketika masih kuliah di IAIN Jakarta, Cak Nur terpilih sebagai Ketua Umum PB HMI, September 1966-1969. Bahkan setelah ia menamatkan kuliahnya di IAIN (1968), ia masih diminta lagi untuk menjabat ketua periode kedua: 1969-1971 — (penjelasan ed.)

Posisi politis HMI sekarang ini bagaimana, *sih*?

Menurut saya, HMI sekarang ini memang dalam keadaan sulit. Tapi kesulitan itu sebetulnya umum dari organisasi ekstra. Tapi HMI itu, mungkin karena volumenya yang besar, masih tetap yang paling lumayan. Artinya HMI jelas eksis. Eksistensinya riil. Yang lain itu *kan* banyak yang tinggal papan nama. Banyak organisasi yang proses pergantian kepemimpinannya pun tidak jelas. Ada yang sudah bapak-bapak masih menjadi ketua organisasinya. Dalam soal itu HMI paling baik. Metabolisme kepemimpinan itu cepat sekali. Rata-rata dua tiga tahun sudah diganti.

Cuma, dalam situasi di mana orang dituntut untuk berjuang dalam tema-tema proaktif, bukan reaktif, maka usaha meneguhkan eksistensi itu lebih sulit. Kalau dalam perjuangan reaktif itu *kan* gampang saja. Dengan pidato, retorika, sudah bisa.

Apa karena itu pula, maka sekarang HMI terasa agak lebih kecil dibanding dulu?

O, ya dengan sendirinya. Tapi tidak berarti bahwa dulu lebih hebat dari sekarang. Menurut saya, dulu itu besar karena faktor-faktor demografis-sosiologis. Faktor demografis-sosiologis yang saya maksud itu, ialah saat-saat tahun 60-an itu *kan* tahun-tahun pertama para santri terwakili dengan jumlah yang banyak sekali di perguruan tinggi, di universitas. Sekitar tahun 60-an awal.

Tapi kabarnya anak kota agak kurang tertarik, apa benar begitu?

Nah, di situ sayangnya. Kalau tahun 60-an, HMI itu adalah organisasi tengahan! Artinya di tengah persoalan betul. Di tengah persoalan universitas. Sekarang itu HMI periferi. Jadi marginal. Makin terdesak ke pinggir. Jadi, secara politis tidak lagi berada di pusat-pusat pengambilan keputusan gerakan mahasiswa di universitas besar. Secara fisik, ada gejala HMI sekarang menjadi organisasi perguruan tinggi kecil, marginal.

Mungkin ada alasan tertentu, Anda tidak menyekolahkan anak-anak di pesantren?

Pesantren itu memang ada plus-minusnya. Plusnya sudah jelas. Minusnya ialah, dari segi metodologi itu tidak begitu efisien. Misalnya, menurut saya, yang paling penting yang bisa diperoleh dari pesantren, itu sebetulnya bahasa Arab. Biar pun suasana keagamaan itu juga penting. Tapi sebetulnya di rumah tangga itu lebih baik. Saya ingin anak saya itu, kalau rasa keagamaan, bisa diperoleh di rumah tangga. Kemudian saya ingin dia tahu bahasa Arab. Ini ada cara-caranya yang lebih cepat. Misalnya di Lembaga Bahasa Arab Saudi, Menteng. Dulu memang kita panggilkan juga guru bahasa Arab.

Kemudian paham keagamaan. Di pesantren itu saya melihat ada hal-hal yang sebenarnya tidak perlu, tapi ditekankan. Misalnya, fiqih untuk apa? Padahal itu memakan energi, memakan waktu. Di Gontor misalnya, banyak hal-hal yang tidak perlu. Kalau masalahnya ialah menjadi Muslim yang baik dan mengerti hal-hal keislaman, menurut saya keahlian dalam keislaman itu tidak lagi dalam arti hanya tahu soal halal dan haram dan sebagainya itu, tapi pikiran dan ajaran etis yang bisa mempengaruhi tingkah laku kita sehari-hari. Maka berkaitan dengan itu saya terpikir memang, pelajaran agama di pesantren dan di sekolah pun sebetulnya harus direvisi. Sekarang ini *kan* titik beratnya adalah fiqih.

Oleh karena itu tidak menarik. Maka saya dengar banyak orang-orang Islam sendiri yang lebih tertarik untuk mengikuti pelajaran agama-agama lain, karena di sana ada filsafat dan sebagainya. Lihat saja karangan-karangan siapa saja yang biasa disebut sebagai ahli keagamaan, apa yang mereka maksudkan sebagai agama? Itu masih cerminan dari pesantren. Karena itu saya agak memberontak. Saya tidak tahu bagaimana, tapi tanpa pretensi yang terlalu tinggi kita mencoba untuk memberikan suatu alternatif. Ya, itu termasuk yang kita salurkan lewat Paramadina ini.

Jadi itu alasan saya. Menyangkut soal yang sangat prinsipil. Karena pengalaman saya di pesantren, maka tentu saya tidak akan mengingkari jasa-jasa pesantren. Tapi dalam suatu tinjauan kembali secara kritis, sebetulnya ada hal-hal yang bisa diperbaiki. Sementara hal itu belum bisa diperbaiki, saya melihat cara lain.

Sebentar, ini soal lain. Bagaimana keluarga bahagia itu menurut Anda? Apa ukuran-ukurannya?

Tentu intinya adalah sebuah keluarga yang terdiri dari orangtua dan anak, yang tinggal di satu rumah; artinya tidak terpisah, dan banyak bertemu, banyak punya waktu untuk keluarga. Bisa sembahyang bersama, meski tidak selalu tapi sering sembahyang bersama. Ngomong-ngomong dan punya acara ekstra bersama. Itu menurut saya. Ya tertanam rasa cinta kasih. Maksud saya, cinta kasih yang secara psikologis benar. Artinya tidak perlu kepada sikap-sikap posesif dari orangtua kepada anak. Mau menguasai. Jadi ada semacam kebebasan, ada keakraban dalam rumah tangga itu. Dan tidak perlu struktur atas-bawah bapak-anak itu terlalu tegas. Jadi demokratislah, begitu.

Anda tidak punya semacam kompleks Barat dan Islam. Juga Anda tidak ada rasa ketakutan bahwa modernisasi akan mengancam kehidupan agama dalam keluarga-keluarga?

Sama sekali tidak. Saya pernah mendengarkan ceramah di Montreal oleh Profesor Abdul Azis Sachedina dari North Carolina. Dan ini orang Syi'ah, *he is very intelligent person*, sangat tinggi reputasinya. Dia memberikan ceramah kepada kita mengenai Syi'ah. Juga pengalaman dia sebagai guru di Universitas Jordan di Aman, bagaimana dia merasa dihalang-halangi oleh korps dosen di sana, karena dia orang Amerika. Memang dia sudah menjadi warga negara Amerika. Atau datang dari Amerika. Lalu karena dia Syi'ah. Kemudian dia memberikan ceramah yang bagus sekali. Tapi kemudian saya tanyakan. Ya, saya setuju dengan isi ceramah Anda, tapi saya selalu bertanya-tanya dalam hati, mengapa slogan Republik Islam Iran itu kutipan al-Qur'an yang menyangkut masalah Barat dan Timur dan rumusannya negatif, yaitu: tidak Barat dan tidak Timur?

Ada suatu ilustrasi bahwa Tuhan itu adalah cahaya dari langit dan bumi. Cahaya itu ibarat sebuah lampu dalam gelas kristal yang bening, yang dinyalakan dengan minyak zaitun yang tidak berasal dari Timur dan tidak dari Barat. Mengapa itu yang diambil? Mengapa tidak diambil yang positif. Di al-Qur'an itu banyak sekali statemen bahwa Barat ataupun Timur itu milik Tuhan. *Nah*, Pakistan dulu menggunakan yang positif: Kepunyaan Tuhanlah Barat dan Timur. Meskipun waktu itu maksud orang Pakistan adalah Pakistan bagian barat dan bagian timur itu kepunyaan Tuhan. Tapi sekurang-kurangnya diambil yang positif.

Saya berpendapat, umat Islam sekarang menderita kompleks anti-Barat oleh karena pengalaman sejarahnya, baik yang lama maupun yang baru; tapi terutama yang baru yaitu pengalaman kolonialisme-imperialisme. Tapi sebetulnya kita ya harus adil dan harus obyektif. Al-Qur'an sendiri mengatakan; janganlah kebencian suatu kaum, membuat kamu tidak adil. Begitu juga terhadap Barat. Yang jelas, lihat saja Khomeini pun berhasil melancarkan revolusinya juga setelah dia pindah ke Barat, ke Prancis. Jadi kita tidak usah munafiklah. Bagaimanapun juga di Barat lebih banyak kebebasan daripada di negeri-negeri Timur. Oleh karena itu saya

sangat tidak suka dengan retorika-retorika anti-Barat. Menurut saya itu *nonsense*.

Orang yang mempunyai retorika seperti itu, apakah karena pemahaman keislamannya kurang menyeluruh, kurang mendalam, atau karena faktor lain?

Saya cenderung mengatakan karena faktor kungkungan psikologis. Karena dia itu mewarisi suatu pengalaman yang kurang menyenangkan dengan Barat, lalu dia tumbuh dalam suasana menghukum Barat. Jadi tidak obyektif.

Kalau Anda melihat kelompok dalam Islam yang cenderung eksklusif, ini yang benar dan itu yang tidak benar, dilihat dalam kerangka politik secara agak besar, apa Anda lihat sebagai hambatan?

Di satu pihak, kita bisa melihat sebagai gejala akibat perubahan sosial. Tapi di lain pihak, pertumbuhan itu tetap negatif, karena eksklusivisme bagaimanapun juga bersifat memecah-belah. Dan orang mestinya tidak boleh begitu. Islam mestinya tidak mengizinkan adanya *cultic-system*. *Pertama*, karena agama kita sejak semula ditegaskan tidak ada sistem kependetaan. Itu artinya tidak ada otoritas keagamaan pada seorang manusia. Semua orang itu langsung berhubungan dengan Tuhan. *Kedua*, pencarian kebenaran itu harus dengan suatu pemihakan kepada yang baik dan benar secara terbuka. Dari siapa saja, harus begitu. Oleh karena itu, sebetulnya agama Islam itu agama yang tidak pakai nama. Islam itu menjadi nama sebagai perkembangan kemudian. Kalau kita lihat al-Qur'an, panggilan kepada kelompok yang mengikuti Nabi itu orang-orang yang beriman, kaum beriman.

Jadi bukan: Hai orang-orang Islam?

Bukan. Nggak ada itu. Jadi mengapa ada perkataan Islam di situ, karena menurut al-Qur'an, agama itu dalam bahasa Arab disebut *dîn*, artinya sikap tunduk. Sikap tunduk yang sah bagi Tuhan adalah sikap pasrah kepada Tuhan. Sekarang pasrah kepada Tuhan itu disebut Islam. Jadi karena agama ini mengajarkan sikap pasrah kepada Tuhan, maka perkataan Islam digunakan. Tapi perkataan Islam itu juga bisa digunakan kepada semua agama yang lain, terutama yang datang dari nabi-nabi. Itu semuanya Islam. Tapi tidak dalam arti-nama agama.

Apa di kitab-kitab terdahulu ada kata islam?

Dalam kitab-kitab terdahulu dengan sendirinya ada perkataan islam, tapi untuk orang Arab, Islam waktu itu tidak diartikan sebagai nama agama secara eksklusif. Karena itu orang Arab sampai sekarang berbeda persepsinya mengenai Islam dengan orang yang bukan Arab. Orang yang bukan Arab, seperti Indonesia dan sebagainya cenderung menganggap Islam itu nama eksklusif sebuah agama. Tapi kalau orang Arab, islam itu adalah sikap batin tunduk kepada Tuhan. Karena itu tidak mengizinkan adanya kultus, *cultic system* itu.

Hadirnya kelompok-kelompok seperti Forum Demokrasi atau Majelis Reboan, menurut Anda apa punya makna politis? Artinya, ada kaitan dengan desakan untuk mempercepat proses demokratisasi dalam masyarakat kita?

Salah satu yang kita perlukan adalah adanya alternatif-alternatif. Kalau kita tidak mau menuju masyarakat yang monolitik, berarti kita memerlukan alternatif-alternatif itu. Oleh karena itu, dalam hal ini, Forum Demorkasi itu adalah suatu tawaran mengenai alternatif.

Jadi bukan suatu permintaan akan perlunya demokratisasi dipercepat?

Begini. Suara mereka memang menuntut semakin dilakukannya demokratisasi. Tapi itu *kan* jadinya suatu alternatif. Dan semakin banyak semakin baik. Tapi di kita masih kurang sekali alternatif semacam itu.

Apakah menurut Anda partai-partai politik cukup handal untuk dijadikan wahana mendorong proses demokratisasi itu?

Sebenarnya orang-orang parpol itu banyak yang masih terjerat oleh *vested interest*. Karena, sudah bukan rahasia lagi, bahwa menjadi anggota parpol dan memperoleh posisi tertentu dianggap *nyambut gawe* (bekerja). Karena itu mereka terus jadi tawanan bagi *vested interest*-nya sendiri. Kalau mereka diajak bicara hal-hal yang kemungkinannya bisa membawa perubahan, dan perubahan itu kemungkinan akan membawa diri mereka pada kesulitan, mereka jelas tidak mau. Adanya parpol itu tidak perlu digugat-gugat. Tetapi mereka itu didorong untuk lebih mandiri. Ini terutama sekali relevan untuk Golkar. Golkar itu harus dinyatakan sebagai partai. Sama dengan PDI dan PPP dan harus bebas ikatannya dengan militer dan birokrasi, dan harus berdiri di atas *platform* yang sama dengan semua partai yang lain. Mungkin lebih tepat berdiri di bawah semua golongan.

Oleh karena itu, dalam pemilu yang akan datang, agar wakil rakyat benar-benar mempunyai basis pemilih yang jelas, perlu pemilu dilaksanakan secara distrik. Dengan begitu calon itu benar-benar dikenal oleh rakyat yang memilih. Dengan begitu seorang calon benar-benar merupakan wakil rakyat. Tidak seperti sekarang, yang benar-benar wakil pimpinan partai. Itu yang paling menjengkelkan dari segi pemilu. Sekarang orang memilih partai atau golongan lebih banyak merupakan penyalur dari *vested interest* dan kemudian menjadi kumpulan orang-orang yang sebetulnya sedikit sekali memiliki dasar bahwa mereka dipilih rakyat. Rakyat itu memilih dengan terpaksa. Belum tentu rakyat menghendaki mereka. Mengapa disebut terpaksa? Karena itulah satu-satunya

sistem yang ada. Karena itu sistem yang ada sekarang cukup sekian saja. Di masa yang akan datang, sistem harus diubah. Apalagi kita menghadapi masa tinggal landas. Kita menghendaki sistem politik yang mampu menopang tinggal landas.

Anda melihat perlunya ada partai keempat dalam sistem politik kita?

Tidak. Menurut saya, asal sistem distrik itu dijalankan, partai keempat atau seberapa tidak perlu. Bahkan partai yang sekarang ada ini malah bisa juga menciut. Kemudian yang berkaitan dengan itu, saya kira kita harus melembagakan oposisi. Oposisi itu tidak negatif. Bangsa Indonesia itu, mungkin karena nilai-nilainya menganggap oposisi negatif. Oposisi itu positif, yaitu sebagai cara pengendalian kekuasaan secara damai. Kudeta yang damai. Dengan adanya oposisi, rakyat kita dididik selalu ada alternatif dengan mendukung oposisi itu. Dan itu harus sudah dimulai, dan jelas memperjuangkan apa, harus sudah jelas. Termasuk orang pertama dan keduanya. Yaitu presiden dan wakil presiden. Keduanya harus kampanye supaya bisa dites oleh rakyat. Yang akan datang harus begitu.

Pola perimbangan sipil-ABRI yang ideal menurut Anda bagaimana?

Agak susah, karena ini menyangkut sejarah yang amat khusus mengenai bangsa kita. Yang sekarang disebut ABRI itu sebetulnya aspiran-aspiran politik, orang-orang yang mempunyai cita-cita politik, di zaman tahun 45 itu, lalu bersenjata. Karena mereka itu kebetulan masih muda waktu itu. Artinya bukan tentara profesional. Karena itu ada juga benarnya kalau mereka mengklaim bahwa mereka selalu *concerned* dengan masalah-masalah kebangsaan dan merasa lebih tahu. Tapi, situasi itu *kan* ada kaitannya dengan pengalaman tahun 45. Maka tepat sekali kalau mereka disebut Generasi 45. Artinya tidak akan berlangsung untuk selama-lamanya. Suatu saat

kita harus kembali pada tatanan yang lebih formal. Dan ABRI, dalam kaitannya dengan persoalan kenegaraan tadi, harus netral. Artinya harus berdiri di atas semua golongan atau — sebenarnya — di bawah semua golongan. Bukan di atas. Berdiri di bawah semua golongan, kemudian menjaga keamanan, menjaga keutuhan republik.

Akhir-akhir ini banyak orang bicara tentang pola kepemimpinan masa depan, dalam menghadapi situasi baru dan perubahan-perubahan sosial. Orang bilang akan diperlukan *expertise*, keterampilan lebih canggih dan lain-lain.

Jelas itu tuntutan yang tidak bisa dihindari. Di masa yang akan datang, kalau orang tidak punya keahlian, ya susah. Karena itu para pemimpin, katakanlah pemimpin politik, ya harus profesional dalam soal politik. Mereka harus baca semua literatur mengenai politik. Apalagi negara ini didirikan oleh para intelektual. Mereka berpolemik, tukar pikiran, berdebat, dan menghasilkan nilai-nilai kenegaraan yang sekarang kita warisi, apakah itu UUD 1945, Pancasila dan sebagainya. Maka akan menjadi suatu kesedihan, suatu ironi, kalau kemudian diteruskan oleh mereka yang tidak mau baca. Sebab mau tidak mau, kita ini adalah bangsa yang hidup di zaman modern, dengan nilai-nilai kemodernan. Tidak bisa kita mengisolir diri, misalnya kita hanya hidup dalam nilai-nilai khas Indonesia. Itu *nonsense*.

Sekadar perbandingan saja, di Amerika itu seorang anggota kongres di-*back up* oleh suatu tim yang kuat sekali, yang kerjanya mensuplai bahan-bahan dan pikiran-pikiran. Oleh karena itu perpustakaan yang terbesar di dunia itu perpustakaan kongres. Karena mereka itu membaca. Jadi semua pikiran yang mereka kemukakan itu, tidaklah sesuatu yang diambil dari angkasa. Itu betul-betul berdasarkan bahan-bahan bacaan oleh tim ekspert. Mereka menyewa ahli-ahli, karena memang ada biaya untuk itu. Kalau perlu keluar uang sendiri. *Nah*, orang DPR sini mana yang baca? Kalau saya lihat pidatonya, waduh ini orang tidak pernah baca. Padahal, di situ sudah mulai ada perpustakaanya. [❖]